

KEMENANGAN KANDIDAT *INCUMBENT* DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG

Studi Atas Pilkada Kabupaten Bantul 2005

Oleh

Bambang Wahyu Nugroho*)



irect election of local leader is carrying morale messages about nationalism and statesmanship by putting sovereignty on people hand, i.e. people interest to realize more democratic local government. The study was conducted in pre campaign period with respondents of Bantul people. The study was intended to project voter behavior and to know how far the information about direct election of local leader has been understood by communities.

I. PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung (Pilkadasung) merupakan salah satu sarana penting dalam perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Amandemen Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Pilkada mengemban pesan moral dan semangat dalam berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, yakni kepentingan rakyat untuk mewujudkan kehidupan pemerintahan daerah termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang **lebih demokratis**.¹

Dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh rakyat yang berhak pilih, yakni:²

1. warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan sudah berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah pernah menikah;
2. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa ingatannya;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
5. dan terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan

*) Drs. Bambang Wahyu Nugroho, M.Si. adalah Staf Pengajar Fisipol UMY

1) Baca Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 hal. 1-2.

2) Ibid.

Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

B. ALASAN PENELITIAN

Sebelum dilaksanakannya Pilkadaesung, kita sempat mendengar beberapa prakiraan yang menghawatirkan akan tidak sukses, sebab dikatakan bahwa "masyarakat belum siap," "tenggat dari persiapan hingga pelaksanaan terlampau pendek," "aturannya belum jelas," bahkan ada perkiraan akan menimbulkan keresahan, bahkan kerusuhan, di antara masyarakat di daerah. Di samping itu juga terdapat perkiraan-perkiraan tentatif yang mengidentikkan antara Pilkadaesung dengan pemilu, atau pilpres dalam memprakirakan hasilnya, sehingga kalkulasi-kalkulasi dibuat berdasarkan perhitungan yang samar-samar tersebut. Untuk membuktikan apakah semua perkiraan itu cukup beralasan atau hanya kekhawatiran yang berlebihan dan tak beralasan, maka perlu kiranya ditelaah melalui penelitian ilmiah.

Sebagian dari keraguan akan pelaksanaan Pilkadaesung itu juga terletak pada kerancuan peraturan penyelenggaraan itu sendiri. Sejak pemilu hingga pilpres 2004, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berkedudukan sebagai pelaksana keputusan-keputusan KPU dan bertanggung jawab ke KPU pula. Namun dalam Pilkadaesung ini, KPUD di masing-

masing daerah, propinsi, kabupaten, maupun kota, menjadi pembuat aturan sekaligus pelaksanaannya. Lalu harus bertanggung jawab kepada siapa, itu soalan berikutnya, yang sampai saat ini tidak pernah jelas. Namun di luar semua keinginan untuk menjawab berbagai prakiraan, kekhawatiran, atau kerancuan tersebut, sesuatu gejala politik yang baru memang akan menjadi obyek yang menarik untuk diteliti.

C. LATAR BELAKANG

Salah satu alasan penting dilakukannya penelitian atas Pilkadaesung adalah karena ia memiliki ciri sebagai gejala politik baru sekalipun tidak samasekali baru dalam praktik demokrasi politik di Indonesia. Memang sebelumnya sudah berlangsung pemilihan Badan Perwakilan Desa (BPD) secara langsung disusul pemilihan Lurah dan Pamong Desa secara langsung pula, kemudian pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung, dan terakhir pada tahun 2004 berlangsung pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) pun secara langsung. Oleh karena itu, kebaruan tersebut tidak terletak pada kultur pemilihan langsungnya, melainkan pada pengalaman khasnya, sebab sebelumnya Gubernur dan Bupati-Wakil Bupati/Walikota-Wakil Walikota belum pernah dipilih secara langsung.

Oleh karena dalam hal-hal tertentu bukan merupakan persoalan baru, misalnya menghubungkan antara koalisi partai dengan hasil aktual Pilkadaesung, kita barangkali bisa melakukan perampatan (generalisasi) dengan memanfaatkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pemilihan-

pemilihan langsung. Misalnya pilpres, sebagaimana yang dilakukan oleh berbagai lembaga jajak pendapat nasional.³ Namun dalam hal pemilihan pejabat eksekutif daerah, ini jelas merupakan pengalaman baru yang tak memiliki preseden. Oleh karena itu penelitian eksploratif (jolak) pun bisa dilakukan dengan maksud dapat dijadikan pertimbangan dan perbandingan dengan penelitian-penelitian sejenis, hingga pertimbangan praktis dalam pilkadasung di berbagai tempat dan di waktu-waktu selanjutnya.

D. TUJUAN PENELITIAN

Dengan mengasumsikan sifat kebaruan dalam pilkadasung ini, pertama-tama yang diperlukan adalah melakukan eksplorasi (penjajakan, penjolokan) terhadap proses-proses pilkadasung. Eksplorasi tersebut bisa difokuskan pada tiga aspek, yakni kebertahuan, opini, dan proyeksi warga mengenai pilkadasung.

Menurut Babbie, tujuan penelitian eksploratif adalah untuk:⁴

1. semata-mata memuaskan rasa ingin tahu dan hasrat peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai sesuatu yang relatif baru;
2. mengetes/menguji kelaikan yang diarahkan pada kemungkinan dilakukannya kajian yang lebih serius; atau
3. mengembangkan metode-metode yang akan diterapkan dalam kajian selanjutnya yang lebih mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memproyeksikan perilaku pemilih dalam pilkadasung. Namun untuk menganalisis perihal tersebut, beberapa pertanyaan berikut harus dijawab terlebih dahulu, yakni (1) seberapa jauh informasi tentang Pilkadaesung 2005 ini sudah tersosialisasikan di kalangan warga pemilih; dan (2) bagaimana opini warga yang mengetahui pilkadasung tersebut terhadap aspek-aspek penting di dalamnya. Dengan penjajakan terhadap dua masalah tersebut maka akan sampai ke inti analisis yakni jajak pendapat mengenai proyeksi warga pemilih terhadap perolehan suara pilkadasung 2005 di Kabupaten Bantul yang diharapkan akan mengungkap proyeksi awal dari perilaku memilih warga dalam pilkadasung tersebut.

E. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, hampir di seluruh Indonesia akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADASUNG) pada tahun 2005 ini secara langsung oleh rakyat. Pilkadaesung tahun 2005 dibagi menjadi dua termin, yakni pada bulan Juni dan bulan September. Pada bulan Juni 2005 ini ada sekitar 268 Kabupaten/Kota dan 8 Provinsi yang menyelenggarakan Pilkadaesung. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkadaesung bulan Juni 2005 akan berlangsung di tiga Kabupaten: Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman. Dengan demikian Kabupaten

3) misalnya LP3ES, LIPI, maupun LSI (Lembaga Survei Indonesia) yang telah melakukan survey proyeksi maupun quick count terhadap Pilpres.

4) Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, hal. 221, baca juga Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, peny., *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 4.

Bantul adalah salah satu di antara sekitar 240-an Kabupaten/Kota di Indonesia yang akan menjadi "percobaan" pertama Pilkadaesung langsung. Menurut Peraturan KPUD Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2006, pelaksanaan pemungutan suara pilkadaesung di Kabupaten Bantul ditetapkan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005.

Pada periode pendaftaran pasangan calon, yakni tanggal 4 s.d. 11 April 2005, sebanyak 3 (tiga) pasangan mendaftar secara berurutan waktu kedatangannya ke KPUD, yaitu sebagai berikut (Calon Bupati/Calon Wakil Bupati):⁵

1. **H. Totok Sudarto - drh. H. Riswanto, M.M.**
2. **Drs. GBPH Yudhaningrat, M.M. - H. Aziz Umar, B.A.**
3. **Drs. H.M. Idham Samawi - Drs. Sumarno, Prs.**

Deskripsi singkat mengenai calon:

1. **H. Totok Sudarto**, berlatar belakang sebagai Perwira Menengah TNI AU berpangkat Kolonel. Dia adalah mantan Wakil Bupati Bantul (periode 2000-2004) yang dahulu memenangi Pilkadaesung tahun 1999 menjadi wakilnya Idham Samawi, namun pada tahun 2002 dengan satu dan lain alasan mengundurkan diri dari kedudukan Wakil Bupati Bantul, kemudian mencoba mencalonkan diri sebagai Bupati di Bondowoso, namun tidak berhasil.
2. **drh. H. Riswanto, M.M.** adalah seorang birokrat di bidang Pertanian dan Peternakan, dan pada pernah mencalonkan diri pada sebagai

calon Bupati Bantul pada Pilkadaesung 1999 berpasangan dengan H. Tohayadi, B.A., Wakil Ketua DPD Golkar Bantul waktu itu, menjadi salah satu kandidat lawan pasangan Idham-Totok.

Pasangan Totok SudartoRiswanto dicalonkan oleh Koalisi partai-partai: Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan sejumlah Partai-partai lainnya seperti Partai Bulan Bintang, Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Patriot Pancasila, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Persatuan Daerah. Koalisinya disebut Koalisi "Sejahtera Bersama."

3. **Drs. GBPH. Yudhaningrat, M.M.** yang biasa dipanggil "Gusti Yudhan" adalah putra *Allahuyarham* Sri Sultan Hamengku Buwono IX, adik tiri Sri Sultan Hamengku Buwono X (lain ibu). Dia berlatar belakang sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Propinsi DIY dan di Kraton Yogyakarta menjabat sebagai Manggalayudha (Panglima/Komandan Prajurit Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat).
4. **K.H. Azis Umar, B.A.** adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Bantul dan dia adalah seorang Kyai serta tokoh NU yang memimpin sebuah Pondok Pesantren di daerah Sanden Bantul.

Pasangan YudhaningratAzis Umar dicalonkan oleh Koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Keadilan dan

5) Pengamatan langsung peneliti pada tanggal 11 April 2005 di KPU.

Persatuan Bangsa (PKPB). Pencalonan GBPH Yudhaningrat ini sempat memunculkan kontroversi sehingga Sultan Hamengku Buwono X, baik selaku Gubernur DIY, Sultan Yogyakarta, maupun selaku kakak perlu melakukan klarifikasi untuk menegaskan posisi netral beliau dalam pilkadasung tersebut.

5. Drs. H.M. Idham Samawi adalah Bupati yang tengah menjabat (setelah habis masa jabatannya pada bulan Desember 2004 lalu saat ini jabatan Bupati Bantul dipegang seorang Penjabat Bupati, Drs. Sutaryo). Dengan demikian Pilkadaesung 2005 ini Idham Samawi sebagai Bupati yang *incumbent* akan berupaya mempertahankan dirinya untuk periode kebutarian yang kedua.

6. Drs. H. Sumarno Prs. adalah birokrat karir pada Pemda Bantul dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Sekretaris I.

Pasangan Idham SamawiSumarno dicalonkan oleh Koalisi "Projotamansari" yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (PG), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Indonesia Marhaenis (PNI-Marhaenis), Partai Damai Sejahtera (PDS), dan Partai Demokrat (PD).

Dalam pengundian yang dilakukan oleh KPUD Bantul, urutan pasangannya adalah sbb: (1) Totok SudartoRiswanto; (2) Idham SamawiSumarno; (3) YudhaningratAziz Umar.

F. KERANGKA PEMIKIRAN DAN RUMUSAN PRADUGA

Teori mengenai perilaku dalam pemilihan sudah dikembangkan sejak tahun 1960-an, dengan berkembangnya paradigma behavioralis yang dibarengi dengan berkembangnya perilaku politik warga yang meluas dan dapat dikuantifikasi, yang disebut voting atau pemberian suara dalam pemilihan. Oleh karena itu, voting dengan segera menjadi fokus teknik sampel dan survai serta analisis statistik baru.⁶ Voting dianggap sebagai perilaku politik yang menyediakan sumber informasi yang paling kaya tentang bakutindak (interaksi) antara perseorangan, masyarakat, dan politik. Dengan menelaah misteri perilaku memilih, kita akan mendapat pelajaran penting mengenai hakikat sistem politik dan memperoleh pandangan mendalam atas proses perubahan sosial dan politik.⁷

Pada dasarnya terdapat empat perkembangan model perilaku memilih:⁸ (1) identifikasi-partai; (2) sosiologis; (3) pilihan-rasional; dan (4) ideologi-dominan. Masing-masing model tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menjelaskan perilaku memilih.⁹ Oleh karena itu dalam meneliti perilaku memilih, keempatnya harus dipertimbangkan dalam menyusun deduksi atasnya menjadi praduga (hipotesis) yang akan diuji. Namun dalam hal ini bisa dipradugakan bahwa karena pilkadasung adalah persoalan murni "memilih orang" (pasangan calon), maka model (1) dan (2) nampak kurang relevan, sementara kecenderungan

6) Misalnya karya A.P.C. Campbell, W.E. Miller dan D. Stokes, *The American Voters* (New York: John Wiley, 1960) dan karya D. Butler dan D. Stokes, *Political Change in Britain* (London: Macmillan, 1969).

7) Andrew Heywood, *Politics* (London: Macmillan, 1997), hal. 223-224.

8) *Ibid.*, hal. 224-227.

9) *Ibid.*

pilihan lebih dapat dijelaskan dengan model (4) dan model (3) menjadi pelengkap. Artinya, perilaku memilih dalam pilkadasung:

1. tidak signifikan dihubungkan dengan identifikasi partai;
2. pertimbangan sosiologis dan rasional lebih signifikan daripada pertimbangan pragmatis; dan,
3. calon *incumbent* yang lebih populer selama memerintah cenderung menang (kembali).

G. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan gaya "kuantitatif" yakni meneliti "derajat" lebih atau kurang, dengan menggunakan angka-angka dan metode-metode statistik dan cenderung didasarkan pada pengukuran-pengukuran numerikal terhadap aspek-aspek tertentu dari fenomena yang diteliti; gaya kuantitatif itu mengabstraksikan fakta-fakta khusus untuk menemukan deskripsi umum atau untuk menguji hipotesis kausal; gaya kuantitatif juga menggunakan pengukuran-pengukuran dan analisis yang secara gampang digunakan kembali oleh peneliti-peneliti lain.¹⁰

Aspek tertentu yang dimaksud di sini, sesuai dengan tujuan penelitian eksploratif, yakni penjajakan atas pengetahuan, pendapat, dan proyeksi warga berhak pilih yang diperkirakan dapat diproyeksikan menjadi prakiraan hasil pilkadasung Bantul 2005.

Berdasarkan metode observasinya, penelitian ini menggunakan metode survai. Metode survai adalah penelitian

(dilakukan dengan cara) mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.¹¹ Unit analisisnya adalah individu warga berhak pilih dalam Pilkadaesung Kabupaten Bantul 2005 yang seluruh populasinya berjumlah lebih dari 600.000 (enam ratus ribu) unit.¹²

Kalau diasumsikan jumlah populasi $n=600.000$, maka jumlah optimal sampelnya didasarkan atas pengagihan (distribusi) responden berdasarkan (1) jenis kelamin; (2) proporsionalitas jumlah penduduk per kecamatan; dan (3) golongan usia. Untuk itu sampel diambil sejumlah 1.500 orang.

Agar sampel cukup representatif dan bisa dirampatkan setidaknya untuk seluruh populasi, maka pertama-tama harus diingat bahwa populasi harus erat kaitannya dengan masalah yang dipelajari.¹³ Dalam penelitian ini populasinya tentu saja warga yang berhak pilih tersebut (sesuai dengan syarat-syarat pokok hak pilih) seperti yang telah dipaparkan di muka. Teknik sampling yang digunakan adalah *multistage random sampling*, yakni wilayah survai disebar merata secara bertingkat (Bantul terdiri dari 17 kecamatan yang terbagi dalam 75 kelurahan) dan setelah sampai di tingkat kelurahan, responden dipilih secara acak sesuai dengan struktur golongan usia serta jenis kelamin warga berhak pilih yang menjadi populasi survai.

Penelitian dilakukan di wilayah Bantul secara menyeluruh, yakni di

10) Gary King, Robert Keohane dan Sidney Verba, *Designing Qualitative Research*, (Princeton: Princeton University Press, 1994).

11) Singarimbun dan Effendi, op.cit., hal. 3.

12) pada perhitungan jumlah pemilih dalam Pemilu Legislatif 2004, suara sah berjumlah 505.876 dari sekitar 620.000 pemilih terdaftar.

13) Singarimbun dan Effendi, op.cit., hal. 152.

seluruh wilayah Kabupaten Bantul¹⁴ agar memperoleh simpulan dengan keakuratan dan signifikansi tinggi. Pelaksanaan penelitian, terutama dalam pengambilan data lapangan, yakni wawancara dengan responden, dilaksanakan oleh hampir 300 orang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya yang mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial di bawah ampuan peneliti, dan telah dilatih untuk melaksanakan pendataan tersebut. Secara kronologis, persiapan penelitian dijadwalkan sbb.:

- 25-26-27 April - Tutorial bagi calon Pewawancara
- 2-3-4 Mei - Pembahasan Kuesioner
- 9-10-11 Mei - Pelatihan Wawancara
- 12 sd. 15 Mei - Pengumpulan data
- 16-17-18 Mei - Pelaporan Hasil Survai dan Koding
- 23-30 Mei - Analisis Data dan Pembuatan Laporan

Perlu dicatat bahwa antara selesainya seluruh proses penelitian dengan pelaksanaan pemungutan suara yang sesungguhnya berjarak kurang lebih 30 hari. Namun sekalipun demikian, di dalam periode 30 hari itu terdapat satu faktor penting yang bisa mempengaruhi hasil penelitian, yakni kampanye kandidat. Kampanye, sekalipun waktunya hanya singkat, namun karena pada saat itu terdapat intensifikasi sosialisasi kandidat beserta program-programnya oleh yang bersangkutan ataupun oleh tim

suksesnya, maka bisa menjadi faktor penekan yang memperlebar bias simpulan. Untuk itu sesungguhnya diperlukan penelitian ulang pada pertengahan dan akhir masa kampanye.

II. HASIL PENELITIAN DAN URAIAN

- Jumlah Responden yang ditargetkan 1.500
- Jumlah Data Terkumpul 1.498 (99,87%)

Dengan kelancaran pelaksanaan survai sebagaimana dijadwalkan tersebut ternyata memang memberikan masukan yang sangat signifikan bagi analisis hasil survai. Dari 1500 lembar kuesioner hanya 2 kuesioner saja yang tidak terkumpul. Hal ini dikarenakan salah seorang penyurvai lapangan mengalami hambatan dalam pelaksanaan survai lapangannya karena alasan terjadinya musibah di keluarganya.

Dari pengumpulan hasil survai tersebut setelah diolah dapat disajikan sebagai berikut:¹⁵

Tabel 1.
Responden berdasarkan Jenis Kelamin (n=1498)

JENIS KELAMIN	Jumlah	%
Laki-laki	758	50.6
Perempuan	740	49.4
Jumlah	1498	100

14) Seluruh wilayah kalurahan di Kabupaten kecuali kalurahan-kalurahan di kecamatan Dingo dengan pertimbangan jarak jangkauan dan kondisi medan yang relative lebih jauh dan sulit. Namun "kekurangan" itu ditutup dengan memperbanyak responden di wilayah lainnya yang sosiogeografisnya mirip dengan Dlingo.

15) Perbandingan dengan struktur penduduk didasarkan pada Laporan Hasil Pembangunan Daerah yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Bantul tahun 2004, yang berisi data tahun 2003.

Sedikit agak berbeda dengan struktur penduduk Bantul yang 51%-nya adalah perempuan, hasil survai ini menunjukkan yang 51% laki-laki. Namun perbedaan ini tidak mengganggu analisis mengingat berdasarkan jenis kelamin angka 50:50 masih terwakili oleh kedua jenis kelamin responden.

Tabel 2.
Responden berdasarkan Golongan Usia (n=1498)

GOLONGAN USIA	Jumlah	%
17-29 TAHUN	520	34.71
30-44 TAHUN	488	32.58
45-59 TAHUN	283	18.89
60 TAHUN >	207	13.82
Jumlah	1498	100

Untuk penggolongan responden berdasarkan tingkat usia, sudah mendekati struktur penduduk Bantul, sehingga diharapkan bisa mewakili keseluruhan struktur penduduk atau warga berhak-pilih di Kabupaten Bantul dalam Pilkadaasung ini. Hanya saja, karena data yang tersedia memberikan penggolongan usia 15-29 tahun (35,43%), padahal pemilih mulai berusia 17 tahun, untuk golongan ini sudah tepat angkanya lebih sedikit, yakni 34,71%. Untuk struktur usia lainnya perbedaan antara struktur sesungguhnya dan sampling tidak signifikan, sehingga diharapkan cukup akurat untuk menganalisis hasilnya.

Responden yang diwawancarai ternyata terdapat bias dalam segi tingkat pendidikan. 52% lebih, mestinya maksimal tamat SD, namun hanya bisa ditemui sejumlah 24,23%. Hal ini terjadi karena umumnya warga dengan tingkat

Tabel 3.
Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan (n=1498)

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
Tak sekolah-LulusSD	363	24.23
Lulus SLTP	272	18.16
Lulus SLTA	629	41.99
Lulus PT (D1 S3)	234	15.62
Jumlah	1498	100

pendidikan yang rendah seperti itu jarang yang bersedia menjadi responden. Ini juga ditunjukkan oleh kecenderungan, semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin banyak selisih jumlahnya dengan struktur total populasi berdasarkan tingkat pendidikan. Untuk yang mengaku lulus perguruan tinggi (dari jenjang D-1 hingga S-3) dari 6,5% pada struktur penduduk, ternyata yang menjadi sampel sebanyak 15,62%. Namun karena jumlah masing-masing struktur cukup mewakili, kemungkinan biasanya dalam analisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap variabel-variabel lain bisa ditekan.

Tabel 4.
Responden berdasarkan Pekerjaan Pokok (n=1498)

Pekerjaan Pokok Responden	Jumlah	%
PNS /Pensiunan	154	10.28
Karyawan Swasta	153	10.21
Wiraswasta/Pedagang	359	23.97
Petani/Nelayan/Tukang/Pengrajin	143	9.55
Buruh Tani/Bangunan/Pabrik	197	13.15
Tidak Bekerja	299	19.96
Lain-lain	193	12.88
Jumlah	1498	100

Dalam tabel 4 di atas pekerjaan responden tersebar ke berbagai jenis pekerjaan, sehingga diharapkan mewakili semua jenis pekerjaan responden dalam kaitannya dengan sikap, persepsi dan proyeksi mereka terhadap Pilkadaesung. Sekalipun demikian, angka "tidak bekerja" yang relatif tinggi (19,96%) perlu dicermati karena tingginya angka ini kemungkinan karena responden yang "setengah menganggur" mengaku "tidak bekerja" atau karena memang yang lebih mudah ditemui oleh para surveyor pada jam-jam sibuk adalah mereka yang di rumah-rumah yang notabene kebanyakan "tidak bekerja."

Tabel 5.
Responden berdasarkan Agama (n=1498)

Agama Responden	Jumlah	%
Islam	1446	96.53
Kristen	20	1.34
Katholik	27	1.80
Hindu	2	0.13
Budha	2	0.13
Lainnya	1	0.07
Jumlah	1498	100

Dari seluruh Responden yang ditemui, berdasarkan agama yang dipeluknya terdapat struktur yang sangat mirip dengan struktur pemeluk agama total penduduk Bantul sebagaimana terlihat pada Tabel 5 di atas. Struktur pemeluk agama yang representatif ini diharapkan akan sangat mewakili seluruh populasi yang menjadi generalisasi penelitian ini.

Tabel 6.
Responden berdasarkan Orientasi Keormasan (n=1498)

Ormas Responden	Jumlah	%
Muhammadiyah	513	34.25
NU	285	19.03
Lainnya	79	5.27
Tak Berormas	621	41.46
Jumlah	1498	100

Di Kabupaten Bantul, ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul 'Ulama (NU) merupakan dua sayap organisasi kemasyarakatan yang paling mengakar dan populer. Ormas-ormas lainnya sangat kecil jumlah anggotanya, sehingga dalam penelitian ini hanya diberi pilihan "lainnya, sebutkan...." Namun terlihat dari data yang diperoleh, ternyata sebagian besar responden mengaku "tak berormas," sehingga menggambarkan bahwa di luar komunitas NU maupun Muhammadiyah sesungguhnya terdapat struktur masyarakat parokial dalam bidang keormasan dalam jumlahnya justru mayoritas.

Tabel 7.
Responden berdasarkan Orientasi Orpol (n=1498)

Orientasi Orpol Responden	Jumlah	%
PAN PPP PBB	342	23.22
PDIP PG PKB PD PDS	437	29.61
PKS PKPB	71	4.81
LAINNYA	38	2.58
TAK BERORPOL	610	41.33
Jumlah	1498	100

16) Wawancara dengan Suwandi D. Subrata, anggota KPUD Bantul, 31 Mei 2005.

“Orientasi” terhadap organisasi politik/partai politik (orpol) merupakan konsep yang lebih luas daripada sekadar keanggotaan. Orientasi meliputi baik keanggotaan, kepemimpinan, hingga ketertarikan atau dukungan, sehingga warga yang bukan anggota partai pun bisa menunjukkan arah kecenderungan atau dukungannya terhadap parpol tertentu.

Pada tabel 7 di atas, sepintas, prosentase orientasi responden terhadap orpol tersebut tidak proporsional dengan kumulasi jumlah suara maupun jumlah perolehan kursi partai-partai yang berkoalisi. Namun

mengingat besarnya jumlah responden yang mewakili warga “tak berorpol,” maka hal itu tidak menjadi masalah.

Tabel 8.
Apakah Responden Tahu Ada Pilkadaesung?
(n=1498)

	Jumlah	%
TAHU	1222	81.54
TAK TAHU	276	18.46
Jumlah	1498	100

Tabel 9.
Popularitas Awal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati (Pra Kampanye)
(n=1222)

Pasangan	TAHU	%	TIDAK TAHU	%	Jumlah
TOTOK RISWANTO	532	43.53	702	56.47	1222
IDHAM SUMARNO	1071	87.64	163	12.36	1222
YUDHANINGRAT AZIZ UMAR	629	51.47	605	48.53	1222

Tabel 10a.
Responden yang Menominasikan Pasangan Totok-Riswanto
berdasarkan Orientasi Keormasannya (n=1222)

Ormas	Pilihan Pertama	%	Pilihan Kedua	%	Pilihan Ketiga	%	Tidak Menjawab	%	Jumlah	%
Muhammadiyah	51	11.67	146	33.41	236	54.00	4	0.92	437	100
Nahdlatul Ulama	11	4.93	50	22.42	158	70.85	4	1.79	223	100
Lainnya	9	12.68	10	14.08	49	69.01	3	4.23	71	100
Tak Berormas	33	6.72	141	28.72	314	63.95	3	0.61	491	100
Jumlah	104	8.51	347	28.40	757	61.95	14	1.15	1222	

Tabel 10b.
Responden yang Menominasikan pasangan Idham-Sumarno
berdasarkan Orientasi Keormasannya (N=1222)

Ormas	Pilihan Pertama	%	Pilihan Kedua	%	Pilihan Ketiga	%	Tidak Menjawab	%	Jumlah	%
Muhammadiyah	334	76.43	56	12.81	43	9.84	4	0.92	437	100
Nahdlatul Ulama	175	78.48	25	11.21	20	8.97	3	1.35	223	100
Lainnya	48	67.61	13	18.31	7	9.86	3	4.23	71	100
Tak Berormas	399	81.26	43	8.76	46	9.37	3	0.61	491	100
Jumlah	956	78.23	137	11.21	116	9.49	13	1.06	1222	

Tabel 10c.
Responden yang menominasikan Pasangan Yudhaningrat-Aziz Umar
berdasarkan Orientasi Keormasannya (N=1234)

Ormas	Pilihan Pertama	%	Pilihan Kedua	%	Pilihan Ketiga	%	Tidak Menjawab	%	Jumlah	%
Muhammadiyah	35	8.01	187	42.79	211	48.28	4	0.92	437	100
Nahdlatul Ulama	25	11.21	125	56.05	69	30.94	4	1.79	223	100
Lainnya	13	18.31	36	50.70	19	26.76	3	4.23	71	100
Tak Berormas	33	6.72	238	48.47	217	44.20	3	0.61	491	100
Jumlah	106	8.67	586	47.95	516	42.23	14	1.15	1222	

Pada saat penelitian dilakukan, ternyata lebih dari 18% responden menyatakan tidak tahu akan ada pilkadasung. Oleh karena itu warga yang menyatakan "tidak tahu" tersebut tidak ditanya lebih lanjut, sehingga $n_{(tahu)}=1222$. Menurut keterangan KPUD Bantul, hal itu terjadi karena belum dilakukan sosialisasi secara resmi melalui para lurah desa dan dukuh-dukuh, serta jaringan KPUD PPK dan PPS hingga KPPS.¹⁶

Ketiga tabel (10a, 10b, dan 10c) di atas menggambarkan bahwa orientasi Ormas responden tidak signifikan dalam mempertimbangkan dukungan (pengunggulan) terhadap kandidat. Aziz Umar adalah tokoh NU, dan tidak ada tokoh NU lain yang mencalonkan diri, demikian pula Riswanto adalah tokoh Muhammadiyah, namun keduanya tidak dinominasikan sebagai unggulan oleh warga yang berorientasi ke masing-masing ormas tersebut.

Tabel 11a.
Responden yang menominasikan pasangan Totok-Riswanto
berdasarkan Orientasi Orpolnya (N=1222)

Orpol	Pilihan Pertama	%	Pilihan Kedua	%	Pilihan Ketiga	%	Tidak Menjawab	%	Jumlah	%
PAN PPP PBB	44	15.02	93	31.74	150	51.19	6	2.05	293	100
PDIP PKB PG PD PDS	15	4.30	85	24.36	245	70.20	4	1.15	349	100
PKS PKPB	4	6.90	14	24.14	40	68.97	0	0.00	58	100
Lainnya	2	6.90	10	34.48	14	48.28	3	10.34	29	100
Tak Berparpol	39	7.91	145	29.41	308	62.47	1	0.20	493	100
Jumlah	104	8.51	347	28.40	757	61.95	14	1.14	1222	100

Tabel 11b.
Responden yang menominasikan pasangan Idham-Sumarno
berdasarkan Orientasi Orpolnya (N=1222)

Orpol	Pilihan Pertama	%	Pilihan Kedua	%	Pilihan Ketiga	%	Tidak Menjawab	%	Jumlah
PAN PPP PBB	203	69.28	41	13.99	44	15.02	5	1.71	293
PDIP PKB PG PD PDS	295	84.53	32	9.17	18	5.16	4	1.15	349
PKS PKPB	44	75.86	11	18.97	3	5.17	0	0.00	58
Lainnya	12	41.38	9	31.03	5	17.24	3	10.34	29
Tak Berparpol	402	81.54	44	8.92	46	9.33	1	0.20	493
Jumlah	956	78.32	137	11.21	116	9.51	13	1.06	1222

Tabel 11c.
Responden yang menominasikan pasangan Yudhaningrat-Aziz Umar
berdasarkan Orientasi Orpolnya (N=1222)

Orpol	Pilihan Pertama	%	Pilihan Kedua	%	Pilihan Ketiga	%	Tidak Menjawab	%	Jumlah
PAN PPP PBB	27	9.22	120	40.96	140	47.78	6	2.05	293
PDIP PKB PG PD PDS	31	8.88	179	51.29	135	38.68	4	1.15	349
PKS PKPB	7	12.07	28	48.28	23	39.66	0	0.00	58
Lainnya	11	37.93	5	17.24	10	34.48	3	10.34	29
Tak Berparpol	30	6.09	254	51.52	208	42.19	1	0.20	493
Jumlah	106	8.67	586	47.95	516	42.23	14	1.15	1222

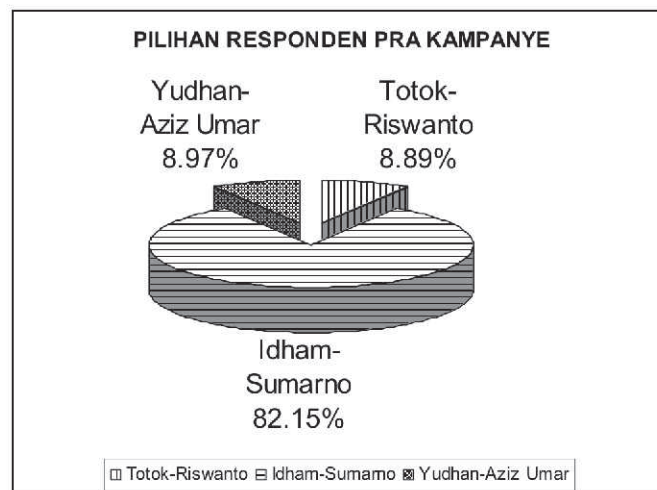
Ketiga tabel (11a, 11b, dan 11c) di atas menunjukkan bahwa orientasi Orpol responden tidak signifikan dalam mempertimbangkan dukungan (pengunggulan) terhadap kandidat. Boleh dikata, di antara keenam kandidat, hanya Idham Samawi yang orientasi kepartaiannya jelas, yakni PDIP. Namun ternyata dia juga dijagokan oleh sebagian besar partisan lainnya. Demikian pula dukungan dari non-partisan.

Tabel 12 menunjukkan bahwa popularitas, yang difahami sebagai citra "dekat dengan rakyat" dan "dikenal luas" lebih didukung oleh warga. Sementara itu, latar belakang partai pengusungnya tidak membawa warga partai tersebut secara otomatis mendukung kandidat yang dicalonkan partainya. Terdapat pernyataan juga bahwa *money politics* (tepatnya "vote buying") sangat kecil pengaruhnya terhadap pertimbangan memilih. Yang nampak masih besar pengaruhnya adalah ketergantungan terhadap figur atau kelompok panutan. Artinya, ketimbang partai atau uang, warga lebih merujuk pada pilihan atau arahan pilihan yang dilakukan oleh tokoh atau kelompok panutannya. Jadi lebih sosiologis dan lebih rasional. Namun demikian popularitas tetap nomor wahid. Dan kenyataannya, seorang kepala daerah yang tengah menjabat boleh dikatakan selama periode jabatannya punya akses besar untuk mempopulerkan diri untuk mendapatkan dukungan pada masa

Tabel 12.
Alasan Responden Memilih Calon Pasangan
N=1222

Alasan	Jumlah	%
Parpol pendukungnya	68	5.56
Calon yang mau memberi Uang/Materi	54	4.42
Tergantung Figur/Kelompok Panutan	348	28.48
Popularitas	741	60.80
Tak menjawab	9	0.74
Jumlah	1222	100

Grafik 1.
Prakiraan Pilihan Responden Pra Kampanye (N=1222)



jabatan kedua.

Postscript:

Hasil Aktual PILKADASUNG:

- Peringkat ke-1:
Idham Samawi - Sumarno:
347.214 (73,06%)
- Peringkat ke-2:
Yudhaningrat - Aziz Umar:
102.501 (21,57%)
- Peringkat ke-3:
Totok Sudarto - Riswanto:
25.521 (5,37%)

Hasil analisis berdasarkan satuan-satuan Kecamatan dan Kelurahan pun menunjukkan kecenderungan yang serupa, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat prakiraan (prediktabilitas) penelitian ini signifikan.

III. SIMPULAN

Penelitian ini diselesaikan pada tanggal 31 Mei 2005. Dibandingkan dengan hasil aktual pilkadasung tanggal 26 Juni 2005, menunjukkan bahwa perolehan pasangan pemenang, Idham Samawi-Sumarno sedikit di bawah proyeksi hasil penelitian, perolehan pasangan Yudhaningrat-Aziz Umar jauh lebih tinggi (sekitar 2,5 kali lipat) dari proyeksi, dan pasangan Totok Sudarto-Riswanto lebih rendah dari proyeksi tersebut. Hasil itu tentunya dipengaruhi oleh masa kampanye, sehingga penelitian ini akan mendekati hasil aktual apabila dilakukan pula pada pertengahan dan akhir masa kampanye. Namun demikian apa yang disimpulkan dari penelitian ini tidak mengubah urutan pemenang aktualnya.

Dari seluruh hasil survai beserta uraiannya tersebut di atas dapat ditarik simpulan utama bahwa model ideologi-dominan memegang peranan penting dalam kecenderungan memilih. Artinya, warga cenderung memilih kandidat

incumbent lebih disebabkan oleh karena "ideologi" yang mendominasi alam-pikiran warga adalah "ideologi" sang *incumbent*. Boleh dikata, seorang kepala daerah yang selama masa jabatannya mampu memberi opini positif bagaikan berkampanye selama lima tahun, tentu tak sebanding dengan saingannya yang hanya berkesempatan sebentar memperkenalkan diri dan programnya kepada calon pemilih. Namun model itu harus didukung pula oleh aspek kepribadian sang kandidat yang bisa dijelaskan dengan model sosiologis dan pilihan-rasional. Namun demikian hasil analisis penelitian ini juga (kembali) membuktikan bahwa sentimen partai tidak berlaku pada pemilihan perseorangan, sebagaimana juga dalam hasil pilpres.

Untuk perampatannya secara lebih luas, pilkada di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbarengan waktunya dengan Kabupaten Bantul adalah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Di Sleman, Ibnu Subiyanto (*incumbent*) menang (lagi), sementara bupati Gunungkidul yang *incumbent*, Yutikno, dikalahkan oleh pasangan kandidat baru, sebab sejak masa sebelum kampanye pilkadasung, secara telak Yutikno tersodok kasus korupsi yang tentu saja memerosotkan popularitasnya. Sementara itu, untuk kasus pilkadasung di Kabupaten Purworejo baru-baru ini, terpilihnya Wakil Bupati *incumbent* Kelik Sumrahadi melawan Bupati *incumbent* juga menarik diteliti untuk membuktikan apakah popularitas Kelik selama menjabat melampaui popularitas Bupati Purworejo. Kemudian, secara praktis, ke depannya hasil penelitian-penelitian seperti ini bisa digunakan sebagai rujukan bagi para bakal calon atau kandidat beserta tim suksesnya untuk mengukur kekuatan ketika akan maju

DAFTAR PUSTAKA

- Butler, D., dan D. Stokes, *Political Change in Britain* (London: Macmillan, 1969).
- Campbell, A. P. C., W.E. Miller dan D. Stokes, *The American Voters* (New York: John Wiley, 1960).
- Gonick, Larry dan Woollcott Smith, *Kartun Statistik*, terj. Tri Pujanarto (Jakarta, Gramedia: 2002).
- Heywood, Andrew, *Politics* (London: Macmillan, 1997).
- King, Gary, Robert Keohane dan Sidney Verba, *Designing Qualitative Research*, (Princeton: Princeton University Press, 1994).
- Laporan Hasil Pembangunan Kabupaten Bantul 2004*, dokumen tak diterbitkan (Bappeda Bantul: 2004).
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian* (Jakarta, Ghalia Indonesia: 1999).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005* (Depdagri RI: 2005).
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, peny., *Metode Penelitian Survei* (Jakarta, LP3ES: 1989).